

## BAB II

### Problematika Illegal Fishing di Indonesia

Dalam Bab II penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fenomena illegal fishing di Indonesia dan bagaimana dampak dari pencurian ikan hingga penulis akan membahas mengenai upaya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pencurian ikan.

#### 2.1 Potensi Kekayaan Sumber Perikanan Indonesia

Indonesia termasuk negara kepulauan dengan besar mencapai hingga 17.504 pulau dan luas perairan laut mencapai hingga 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hingga 2,55 juta km<sup>2</sup>, dan luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>. Indonesia menjadi poros maritim di dunia dalam bidang perdagangan global atau menjadi (*the global supply chain system*) yang akan menghubungkan kawasan Asia Pasifik. Potensi ikan laut yang dimiliki Indonesia diperkirakan mencapai 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan (ZEEI).<sup>1</sup>

Hasil dari potensi sumber daya perikanan tersebut yang diperbolehkan hanya sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari yang ada, dan baru dikelola hanya sebesar 5,4 juta ton dan pada tahun 2013 atau baru 93% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Sementara dari jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 5,863 juta ton. Keunggulan dalam potensi mikro flora-fauna juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa yang akan

---

<sup>1</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 2

datang. Terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia luasnya sudah mencapai 25.000 km<sup>2</sup>. Namun kondisi terumbu karang yang sangat baik hanya sekitar 5,30%, keadaan baik mencapai 27,18%, cukup baik 37,25%, dan keadaan kurang baik sekitar 30,45%.<sup>2</sup> Sekitar 8.500 spesies ikan yang ada, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh wilayah kelautan Indonesia. Kekayaan sumber daya ikan di lautan sekitar 37% dari spesies ikan di dunia, beberapa jenis diantaranya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti, udang, lobster, tuna, ikan karang, hingga bermacam jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah.<sup>3</sup>

Wilayah perairan Indonesia masih banyak yang mempunyai potensi ekonomi namun belum terkelola secara sempurna. Selain itu, potensi energi terbarukan seperti air laut dalam atau (*deep sea water*) yang masih menjadi sebuah tantangan agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masa mendatang. Untuk industri maritim, bioteknologi, produksi garam dan sejenisnya, serta jasa kelautan, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, atau pengangkatan benda tenggelam dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum terselesaikan secara optimal. Potensi budidaya air tawar saat ini yang sudah tercatat mencapai 2.830.540 ha, termasuk potensi perairan umum daratan termasuk sungai dan danau, dengan tingkat pemanfaatan 302.130 ha (10,7%). Potensi budidaya air payau seluas 2.964.331 ha dengan tingkat pemanfaatan mencapai 650.509 ha (21,9%). Potensi luas areal

---

<sup>2</sup> LIPI 2012

<sup>3</sup> Ibid

budidaya laut mencapai 12.123.383 ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 ha (2,7%).<sup>4</sup>

Dari data riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan bahwa sumber daya perikanan laut Indonesia memiliki potensi yang besar dan menjelaskan bahwa stok sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Dari produksi perikanan dapat dihitung penjumlahan hasil produksi perikanan tangkap dan hasil produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015 tercapai jumlah produksi perikanan sebanyak 23,99 juta ton atau sekitar 99,23% dari target sebanyak 24,12 juta ton.

Tabel 2.1 Produksi sektor Perikanan Indonesia pada Tahun 2015

Nama IKU	Target	Realisasi	%
Produksi Perikanan (juta ton)	24,12	23,99	99,23
Produksi Perikanan ikan Tangkap	6,30	6,52	103,51
Produksi perikanan ikan budidaya	17,90	17,47	97,87

Sumber: LKJ.KKP.go.id 2015

Tabel 2.2 Merupakan data jumlah produksi perikanan selama lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.2 Produksi Sektor Perikanan Indonesia Pada tahun 2013-2015

Produksi	Tahun		
	2013	2014	2015
Perikanan tangkap	5,86	6,70	6,52
Perikanan budidaya	13,70	14,52	17,47
Jumlah	19,56	21,22	23,99

Sumber: LKJ.KKP.go.id 2015

<sup>4</sup> Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 diakses dari Kkp.go.id

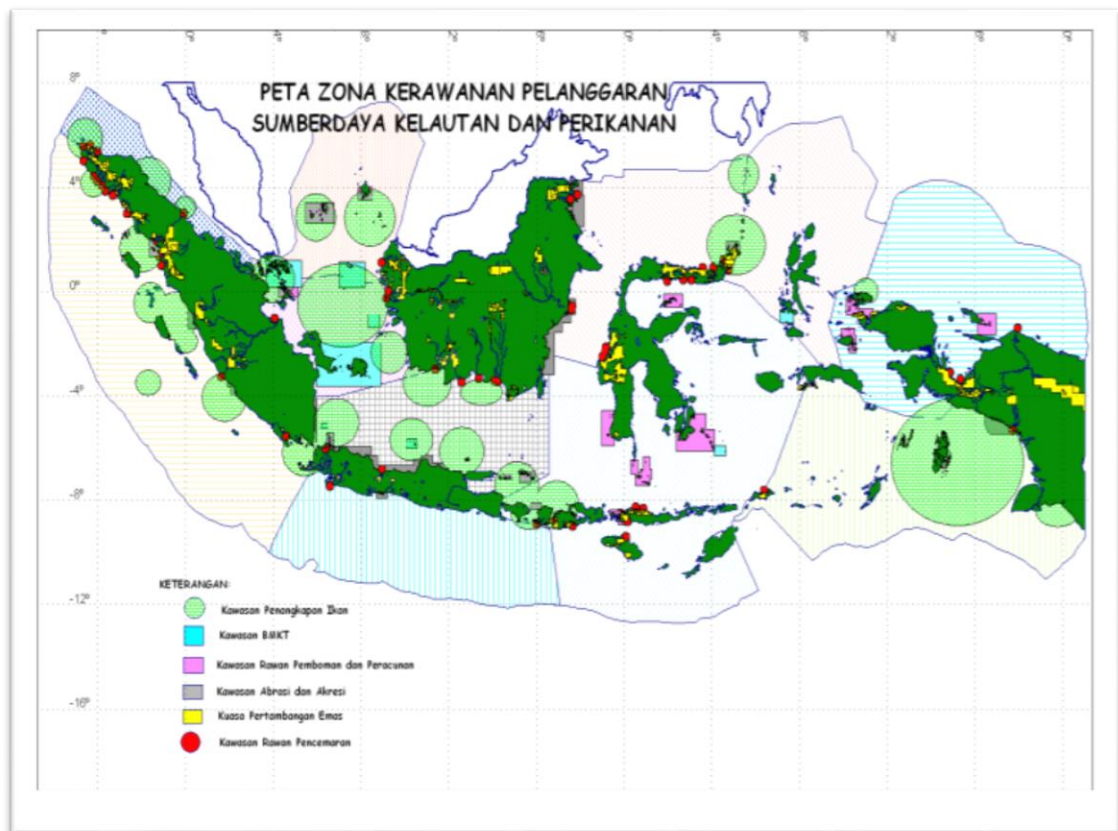
Dari tabel diatas jumlah produksi perikanan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan pada tahun 2014 terjadi perubahan kenaikan mencapai sekitar 13%, apabila dibandingkan dengan target produksi sampai akhir RPJMN pada tahun 2019 hingga mencapai 39,97 juta ton, namun capaian saat ini sudah mencapai 60,02%. Pada tahun 2015 produksi perikanan sebesar 23,99 juta ton yang terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 17,47 juta ton (72,82%), dan 6,52 juta ton (27,18%) dari produksi perikanan tangkap. Melimpahnya sumber daya perikanan membuat permasalahan pencurian ikan. Keadaan seperti ini mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap tindakan yang dapat dianggap melanggar dan merugikan Indonesia terutama dalam bidang maritim. Sektor perikanan adalah salah satu sektor yang memiliki potensi terbesar dalam mengoptimalkan perekonomian negara.<sup>5</sup> Berikut ini peta Zona Kerawanan Pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

---

<sup>5</sup> 2018, Rahadi Wasi Bintoro, *Corporate Criminal Liability Towards The Doer Of Illegal, Unregulated And Unreported Fishing In Indonesia*, diakses melalui [https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/22/e3sconf\\_scifimas2018\\_06003.pdf](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/22/e3sconf_scifimas2018_06003.pdf) Pada Tanggal 22 Oktober 2018



**Gambar 2.1 Gambar Zona Kerawanan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Indonesia<sup>6</sup>**



Sumber: Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*

Gambar 2.1 menggambarkan dimana ada sekitar 31 kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan dan wilayah perairan. Kegiatan tersebut terletak di 32 perairan timur Indonesia yaitu diperairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru). Kedua di wilayah Laut Maluku, Laut Halmahera, ketiga di Perairan Tual keempat Laut Sulawesi kelima di Samudra Pasifik keenam di Perairan Indonesia-Australia ketujuh di Perairan Kalimantan Timur. Wilayah Perairan Barat Indonesia mencakup Perairan

<sup>6</sup> Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, Pada Tanggal 22/09/2018

Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan, Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Selat Malaka, Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga), Selat Karimata, Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat) dan Laut Natuna (Perairan Laut China Selatan).

Wilayah Indonesia yang memiliki posisi tawar yang baik untuk mengelola dan memanfaatkan perikanan tuna untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik. Kawasan perairan Indonesia merupakan lokasi kaya nutrisi dan menjadi tujuan migrasi tuna mencari makanan dan berproduksi. Perikanan tuna di Indonesia merupakan produk perikanan dengan jumlah terbesar kedua setelah udang dengan ekspor yang dijual dalam bentuk segar, kaleng atau berbentuk beku ke negara seperti Jepang, Singapura, Taiwan, Philippina, Mesir, Jordania, Amerika Serikat dan Uni Eropa.<sup>7</sup>

Melimpahnya kekayaan yang dimiliki menimbulkan banyak reaksi negara tetangga seperti pencurian ikan. Kejahatan pencurian ikan bisa terjadi di hampir semua negara yang memiliki sumber perikanan, baik dari perairan yang dangkal ataupun perairan yang memiliki kedalaman yang cukup dalam. Masalah pencurian ikan akan menjadi masalah yang serius terutama di negara berkembang yang kurang menegakkan aturan-aturan hukum seperti kontrol pendaratan kapal patroli, dan inspeksi kapal. Pencurian ikan secara ilegal dengan melanggar peraturan perikanan akan dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama

---

<sup>7</sup> Indonesia Menjadi Anggota Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat Dan Tengah diakses dari [wwf.or.id](http://wwf.or.id)

di negara kepulauan seperti Indonesia, karena masyarakat Indonesia sebagian besar sangat bergantung pada sumber daya ikan.<sup>8</sup>

Masalah pencurian ikan terjadi karena keadaan sektor perikanan global dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Namun, kemampuan yang dilakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia belum cukup memadai. Pencurian ikan juga merupakan permasalahan kejahatan global yang tidak saja tindak pidana perikanan tetapi juga dapat menyangkut perbudakan, perdagangan manusia, penyelundupan hewan, narkoba dan lain-lain.

Stimson Center menganalisis efek dari IUU fishing dari perspektif keamanan nasional dalam laporan 2017. Menurut Asosiasi Pangan dan Pertanian AS, 90 persen perikanan yang didapat sepenuhnya dieksploitasi dengan berlebihan dan stoknya habis. Sekitar 20-50 persen tangkapan ikan global ditangkap secara ilegal, tidak pernah dilaporkan, salah label, atau dari perikanan yang didapat tanpa rezim pengelolaan. Keuntungan yang didapat dari penangkapan ikan ilegal, yang tidak diatur, dan yang tidak dilaporkan sekitar \$15,5 dan \$ 6,4 miliar dalam satu tahun, lebih dari total produk domestik bruto dari beberapa negara hal ini yang menyebabkan pencurian ikan merupakan masalah global.

Bagi masyarakat pesisir yang miskin pencurian ikan dapat mengancam rantai pasokan makanan. Sekitar 520 juta orang yang bergantung pada kegiatan di

---

<sup>8</sup> Seafish The Authority And Seafood, 2012, *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU)*, diakses melalui [http://www.seafish.org/media/742176/seafishguidetoiuu\\_201211.pdf](http://www.seafish.org/media/742176/seafishguidetoiuu_201211.pdf) Pada Tanggal 20/09/2018

Laut seperti memancing dan sekitar 2,6 miliar orang yang bergantung pada ikan sebagai bagian penting dari sumber pemenuhan kebutuhan makanan mereka. Bagi negara berkembang sekitar 50 persen protein hewani mereka berasal dari makanan laut. Penangkapan ikan secara ilegal dapat menimbulkan beberapa ancaman utama terhadap stabilitas dan keamanan di seluruh dunia, seperti ancaman terhadap keamanan ekonomi, ketahanan pangan, keamanan ekologi, dan stabilitas geopolitik, dan juga ancaman kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Crime*) dan ancaman pembajakan maritim. Terkadang kapal penangkap ikan secara ilegal dapat menahan orang yang terjebak sebagai budak di atas kapal mereka. Negara Amerika Serikat adalah negara yang dapat mengimpor lebih dari 90 persen makanan lautnya, dan produk tersebut juga yang akan dikelola oleh orang yang dijebak di dalam kapal sebagai budak untuk kapal.<sup>9</sup>

Masalah pencurian ikan termasuk masalah internasional karena kegiatan tersebut dapat berdampak dan sangat berbahaya bagi stok ikan global. Kegiatan pencurian ikan juga dapat menimbulkan efek yang berbahaya pada kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat secara keseluruhan. Dapat diketahui bahwa Indonesia telah mengalami tingkat IUU fishing yang tinggi dari armada asing. Indonesia pada akhir tahun 2014, berusaha membatasi kegiatan pencurian ikan tersebut hingga negara menerapkan sebuah kebijakan yang keras dan sangat kontroversial hingga menyebabkan sekitar 318 tenggelamnya kapal nelayan yang ilegal (296 berbendera asing) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan jika terjadi peningkatan jumlah pelaku penangkapan ikan secara ilegal karena pada september

---

<sup>9</sup> About IUU Fishing, diakses melalui <https://seashepherd.org/campaigns/iuu-fishing/about-iuu-fishing/> Pada Tanggal 22/09/2018

2017 hingga Agustus 2018 berdasarkan temuan yang dilakukan oleh KKP terdapat sekitar 1.636 kapal yang ditemukan melanggar izin batas wilayah pengelolaan perikanan (WPP).<sup>10</sup>

Nilai strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan ikan dan sumber daya alam telah mempengaruhi wilayah tersebut untuk memiliki potensi konflik. Perbatasan laut Indonesia dengan sepuluh negara tetangga seperti India, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste menyebabkan terjadinya pelanggaran yang sering dilakukan dan terus berkembang seolah tidak terjadi suatu kejahatan bahkan tidak ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran secara terus-menerus.

Setidaknya ada beberapa kasus mengenai pencurian ikan secara ilegal yang dilakukan oleh Vietnam. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencatat banyak kapal berbendera asing masuk dan mencuri ikan secara ilegal di laut Indonesia. Namun pencuri ikan yang berasal dari Vietnam yang paling banyak yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.<sup>11</sup>

## **2.2 Dampak *Illegal Fishing* di Indonesia**

Adanya pencurian ikan yang terjadi di Wilayah laut Indonesia menimbulkan beberapa dampak besar bagi Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh pencurian ikan menurut penelitian ini sangat merugikan dalam beberapa aspek seperti ekonomi, sosial dan politik.

---

<sup>10</sup> Julie Cohen, 2018, *Researchers Explore An Alternative Pathway To Fast-Tracking The Global Recovery Of Fisheries*, diakses melalui <http://globalfishingwatch.org/research/fighting-illegal-fishing/> Pada Tanggal 22/09/2018

<sup>11</sup> *Malaysia dan Vietnam, Negara Asal Pencuri Ikan Terbanyak di Laut RI*, detikFinance.com

### 2.2.1 Dampak Ekonomi

Kegiatan pencurian ikan secara nyata merugikan ekonomi Indonesia. Indonesia telah kehilangan sumber devisa negara yang dapat mencukupi kehidupan dan mensejahterakan masyarakatnya, namun hanya dinikmati oleh beberapa orang atau kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, kerugian Negara yang diakibatkan kejahatan bidang perikanan ini mencapai angka yang luar biasa.

Dalam skala global pencurian ikan merupakan masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Kejahatan pencurian ikan dapat terjadi di hampir semua perikanan, dari perairan dangkal maupun perairan yang memiliki kedalaman yang cukup dalam. Pencurian ikan menjadi masalah yang serius, terutama di negara-negara berkembang yang kurang menegakkan peraturan seperti kontrol pendaratan, inspeksi kapal dan kapal patroli. Pencurian ikan yang berkembang di daerah-daerah di mana pemantauan, kontrol dan pengawasan dalam keadaan lemah. Kejahatan pencurian menimbulkan kerugian global yang diperkirakan antara US \$ 10 miliar dan US \$ 23,5 miliar setiap tahunnya.<sup>12</sup>

Menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization / FAO*) menyebutkan bahwa kerugian Indonesia dari dampak pencurian diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun.<sup>13</sup> FAO

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Bilal Ramadhan, *Astaga, Negara Dirugikan Rp 101 T dari Pencurian Ikan*, diakses dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-tdari-pencurian-ikan>



mengatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya.

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun.<sup>14</sup>

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan dampak negatif akibat pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia yang selama bertahun-tahun dibiarkan. Kerugiannya tidak tanggung-tanggung, menghilangkan separuh dari total rumah tangga nelayan. Hal itu disampaikan saat membuka Diskusi Panel Revisi Undang-undang Perikanan bertema 'Urgensi Revisi Undang-Undang Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan', di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.<sup>15</sup>

Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa lebih dari 7.000 kapal ikan asing kalau ditotal mungkin 10.000 lebih, all time-nya 7.000an, kapal milik luar negeri nangkap ikan di Indonesia bertahun-tahun, menghilangkan 50% jumlah rumah

---

<sup>14</sup> Detikfinance, *Kekayaan Perikanan Laut RI Dimaling Triliunan Rupiah Setiap Tahun*, diakses dalam <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2630886/kekayaan-perikanan-laut-ri-dimalingtriliunan-rupiah-setiap-tahun>

<sup>15</sup> Trio Hamdani, 2018, *Susi Buka-bukaan Kerugian Akibat Pencurian Ikan* - detikFinance



tangga nelayan Indonesia, Susi menyebut, sejak 2003-2013, berdasarkan data sensus pemerintah dan Bank Dunia, jumlah rumah tangga nelayan berkurang dari 1,6 juta menjadi 800 ribu. Tidak hanya itu, Susi menyampaikan 115 perusahaan berbasis ekspor perikanan Indonesia tidak bisa beroperasi lagi akibat pencurian ikan oleh asing yang dibiarkan bertahun-tahun.<sup>16</sup>

Dalam tahun 2003 hingga tahun 2013 sudah membuat 115 perusahaan ekspor ikan dan udang tidak dapat beroperasi. Stok ikan di laut Indonesia akibat pencurian ini pun mengalami penurunan secara tajam. Stok ikan dari 22 juta ton, akibat penangkapan secara ilegal oleh kapal asing, menjadi tinggal 6,5 juta ton saja pada 2013.<sup>17</sup>

Kerugian ekonomi telah berdampak nyata bagi negara Indonesia. Negara ini telah kehilangan sumber devisa negara yang seharusnya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun ternyata justru hanya dapat dinikmati oleh orang tertentu baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor-kekayaan sumber daya alam Indonesia telah membuat cukong-cukong asing yang bekerjasama dengan oknum lokal, yang mengambil hasil kekayaan alam Indonesia. Tidak sedikit kerugian Indonesia yang diakibatkan kejahatan bidang perikanan ini mencapai angka yang luar biasa.<sup>18</sup>

Pencurian ikan berdampak pada sektor ekonomi namun juga berdampak pada sektor kehidupan nelayan, penyebab kemiskinan nelayan adalah masalah penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia oleh kapal-kapal asing

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ade Yunaifah Afriyani, SE (Widyaiswara BPPP Tegal), *Pengaruh Illegal Fishing Di Nkri*, [www.bppp-tegal.com](http://www.bppp-tegal.com)

juga tak kunjung bisa teratasi.<sup>19</sup> Pelaku pencurian ikan rata-rata berasal dari negara luar Indonesia yang bermodal besar. Akibatnya, para nelayan lokal tersingkir dan separuhnya memilih meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan dan memilih untuk membudidayakan ikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari sensus tahun 2003-2013 menjelaskan bahwa jumlah nelayan tradisional turun dari jumlah 1,6 juta orang menjadi hanya 864.000 orang. Sebaliknya, jumlah nelayan pembudidaya mengalami kenaikan dari 985.000 orang hingga sampai hanya menjadi 1,2 juta orang. Menurut data Badan Pusat Statistik 2014 rumah tangga di Indonesia yang berpendapatan dari menangkap ikan. Dari jumlah itu, rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin memasuki jumlah 23,79 persen, nelayan di perairan umum 24,98 persen, sedangkan budidaya 23,44 persen berdasarkan data BPS.<sup>20</sup>

Dengan pendapatan minim tersebut para nelayan Indonesia tidak akan terpikirkan untuk merasakan pendidikan, kesehatan, untuk kebutuhan pangan sehari-hari serta dampak dari Illegal Fishing yang justru memperparah kondisi masyarakat nelayan.

### **2.2.2 Dampak Sosial**

Menurut Indonesia pencurian ikan sudah menjadi perhatian utama, karena permasalahan ini sudah terjadi di perairan Indonesia. Di wilayah Asia Tenggara, sektor perikanan merupakan sumber utama untuk ketahanan pangan. Motif

---

<sup>19</sup>BUMN, *Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap*, diakses dalam <http://bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/IndonesiaRaksasaMaritim-MasihTertidurLelap.html>

<sup>20</sup> Beritagar, *Nasib nelayan di Hari Nelayan Nasional*, diakses dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/nasib-nelayan-di-hari-nelayan-nasional>

ekonomi dijadikan alasan untuk eksplorasi terhadap sumber daya perikanan. Persoalan pencurian ikan ini akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini juga menyebabkan adanya permasalahan sengketa antara para nelayan lokal dengan para pemilik kapal pukat dan juga diantara para nelayan tradisional antar negara.<sup>21</sup>

Akibat dari pencurian ikan dengan menggunakan kapal pukat adalah berkurangnya persediaan ikan di perairan Indonesia. Hingga memaksa para nelayan tradisional Indonesia terlibat dalam kegiatan pencurian ikan. Dampak yang dirasakan oleh para nelayan juga langsung dapat dirasakan, namun tidak hanya nelayan tetapi juga para karyawan pabrik, terutama pabrik-pabrik pengolahan ikan. Seperti Di Tual dan Bejina sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya '*trans-shipment*'.<sup>22</sup>

Indonesia sebagai negara dengan sumberdaya hayati perikanan yang melimpah, maka pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan akibat kegiatan *Illegal Fishing*, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Victor P. H. Nikijuluw. *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2008. Hal. 130

pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi.

### 2.2.3 Dampak Politik

Permasalahan pencurian ikan merupakan sumber utama terjadinya ketidak harmonisan antar negara tidak hanya diantara komunitas. Kegiatan pencurian ikan diperaikan negara tetangga yang dilakukan kapal-kapal pukat (*trawlers*) Thailand sering menimbulkan ketegangan diantara Thailand dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Malaysia, Myanmar dan Indonesia. Karena melibatkan kelompok nelayan dari berbagai negara, maka masalah pencurian ikan akan rentan terhadap konflik yang lebih kompleks yaitu persaingan antar negara. Dan kondisi itu akan semakin meningkat karena sebagian besar negara yang terlibat tidak ingin membentuk kerjasama regional untuk memberantas kegiatan pencurian ikan tersebut.<sup>23</sup>

Karena setiap negara yang bermasalah dengan kegiatan pencurian ikan tersebut seperti tidak ingin dipersalahkan dan tidak ingin untuk dilibatkan. Setiap negara merasa bahwa laut merupakan tempat terbuka (*open access*) dimana siapapun berhak untuk melewatinya. Di Indonesia, hal ini semakin diperparah dengan angkatan laut dan penegakan hukum yang lemah sehingga menyebabkan terbukanya kesempatan untuk melakukan pencurian ikan di wilayah kedaulatan negara. Permasalahan ini sebenarnya bisa sedikit dihindari apabila setiap negara ingin melakukan kerjasama untuk memberantas pencurian ikan.

---

<sup>23</sup> Kementrian dan perikanan BPPP Tegal diakses dari <http://www.bppp-tegal.com/web/index.php/artikel/penangkapan-ikan/534-pengaruh-illegal-fishing-di-nkri>

#### 2.2.4 Dampak Lingkungan

Rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan merupakan dampak dari pencurian ikan yang terjadi. Alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dalam bentuk bahan beracun akan merusak kehidupan dilaut seperti terumbu karang, sebagai tempat berlindungnya ikan, atau menangkap ikan menggunakan trawl dan Pukat harimau yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga akan membuat menipisnya sumberdaya ikan dan akan mengganggu kelestarian sumber daya kelautan.

Konsekuensi akan kerusakan lingkungan yang serius akan muncul ketika praktik penangkapan ikan ilegal dilakukan dengan cara atau metode yang merusak lingkungan, seperti praktik penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit dan racun berbahaya. Terlebih lagi, tidak hanya banyak ikan yang mati, namun habitat dimana tempat tinggal ikan akan juga terkena dampak, seperti *coral reef*. Secara umum, akan terjadi degradasi lingkungan sebagai akibat dari praktik penangkapan ikan ilegal yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan laut. Akibat dari degradasi lingkungan laut, akan menyebabkan menurunnya kesempatan *ecotourism*.<sup>24</sup>

Masalah pencurian ikan dapat berpengaruh bagi hubungan di beberapa sektor kehidupan. Sumber daya ikan (SDI) akan mengalami *degradasi dan overfishing*. Kejadian seperti ini mungkin terjadi jika pasokan ikan terus tereksplorasi hingga titik terendah, sehingga usaha pemerintah dalam penanganan pencurian ikan di Indonesia untuk segera direalisasikan, hal ini bertujuan untuk

---

<sup>24</sup> Ibid.

melindungi nelayan Indonesia, perekonomian negara dan sumber daya kelautan akibat dari pencurian ikan.<sup>25</sup>

### 2.3 Fenomena Illegal Fishing Di Indonesia

*Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing* sudah menjadi fenomena global dalam dunia perikanan. Untuk dapat menjaga ketersediaan ikan di dunia, beberapa negara dan juga organisasi internasional sudah mengimplementasikan usaha konservasi dan juga manajemen untuk mencegah kegiatan – kegiatan yang akan mengancam ketersediaan ikan.

Usaha pembatasan dan penjagaan ini perlu dilakukan karena selama ini kegiatan – kegiatan penangkapan ikan hanya berlandaskan ekonomi dan hanya memikirkan keuntungan sementara tanpa memikirkan aspek jangka panjang sosial, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan – kegiatan yang hanya berorientasi ekonomi inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan. Meskipun secara umum disebut dengan IUU fishing, tentu saja terlebih dahulu perlu kita pahami bagaimana pembagian IUU fishing. Pencurian ikan adalah kapal penangkap ikan yang beroperasi melanggar hukum perikanan. Tindakan – tindakan yang termasuk ke dalam *illegal fishing* adalah menangkap ikan tanpa izin melanggar ketentuan yang ada. Definisi ini mengikat seluruh kegiatan penangkapan ikan baik dalam yuridiksi negara maupun sesuai dengan yang telah diatur oleh *Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)*.

---

<sup>25</sup>Kementrian PPN/bappenas,2014, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan* diakses dari bappenas.go.id

*Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.<sup>26</sup> Pada prinsipnya, setiap kapal perikanan berbendera asing tetap wajib memiliki SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan tertentu. Untuk itu ketentuan 38 UU Perikanan mengatur bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkap ikan dengan hanya membawa 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkap ikan lainnya. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin.<sup>27</sup>

Pencurian ikan merupakan istilah yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia dan menjadi istilah populer di media massa sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, mengemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut bahasa berarti kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau perikanan yang dilakukan secara tidak sah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Trumen Viktor, 2013. *Kebijakan pemerintahan Indonesia Menangani Dampak (Illegal Fishing) Nelayan Malaysia Terhadap Produksi Perikanan Indonesia 2007-2011*. Pekanbaru: Universitas Riau. hal. 11. Juga tersedia di : [http://www.jasavote.com/2012/07/makalah\\_kelautan-indonesia.html](http://www.jasavote.com/2012/07/makalah_kelautan-indonesia.html).

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Graflon, Quentin. 2011, *The Illegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea Bordeness*, Ozford University Press, New York.



*Illegal fishing* menurut Nikijuluw mengemukakan bahwa kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>29</sup> Penangkapan ikan secara ilegal merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional juga disebut pencurian ikan.<sup>30</sup>

Bagi pelaku pencurian ikan yang melanggar batas kedaulatan negara maka dihukum sesuai dengan aturan negara tersebut, serta diatur sesuai hukum Unclos pasal 49 tahun 1982 yang menjelaskan mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para nelayan asing, karena tertulis jelas didalam pasal tersebut bahwa status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah dibawahnya merupakan batas kedaulatan milik negara tersebut, sehingga jika para nelayan asing yang melewati kedaulatan negara tersebut dan melakukan aksi pencurian ikan, maka hal itu bisa ditegaskan sebagai tindakan pencurian ikan.

Terdapat dua tipe pencurian ikan menurut Edison dalam Sodik yaitu kapal asing yang melakukan penangkapan di wilayah yang sebenarnya diperuntukkan untuk nelayan lokal dan kapal-kapal lokal dan penyebab pelanggaran karena

---

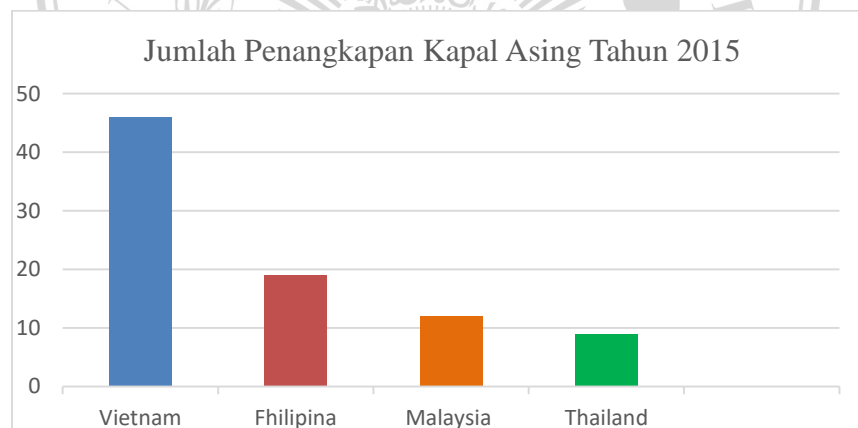
<sup>29</sup> Jaelani, A. Q., & Basuki U. 2014. *Illegal unreported and unregulated (IUU) fishing: Upaya mencegah dan memberantas illegal fishing dalam membangun poros maritim Indonesia*, 168-192

<sup>30</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. 2016. *Apa yang dimaksud IUU Fishing?*, diakses dalam <http://diskanla.langkatkab.go.id/berita/berita-nasional/59-apa-yang-dimaksud-iuu-fishing.html>

melakukan penangkapan tanpa ijin dan menggunakan peralatan yang dilarang, seperti penggunaan bom untuk menangkap ikan.<sup>31</sup> Masalah pencurian ikan terjadi karena keadaan sektor perikanan global dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan.

Di Indonesia sendiri permasalahan illegal fishing menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan. Menurut Syahrin Abdurrahman selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menjelaskan bahwa negara Vietnam merupakan pelaku pencurian ikan yang paling banyak tertangkap di Indonesia. Kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang berhasil ditangkap oleh KKP.<sup>32</sup>

Tabel 2.3 Jumlah Penangkapan Kapal Asing Tahun 2015



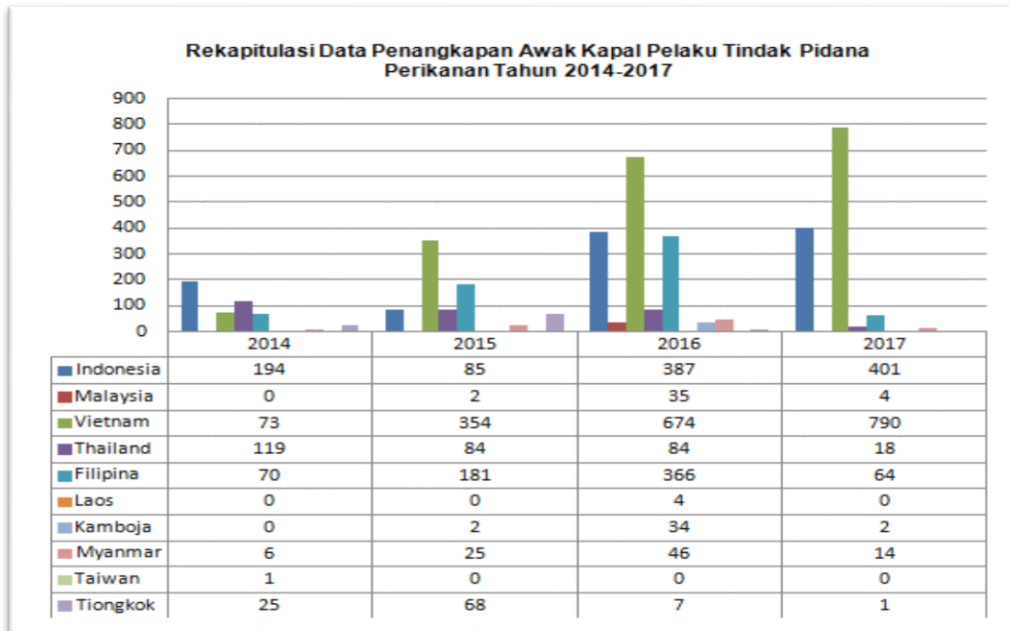
Dari Tabel 2.3 penulis menjelaskan bahwa terdapat beberapa kapal dari negara asing yang berhasil ditangkap Indonesia ketika sedang melakukan Illegal Fishing. Kapal asing yang melakukan pencururan ikan tersebut yang didominasi

<sup>31</sup> Dewinta Ayu Syahrani, *Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, Andunregulated Fishing (Iuu) Pada Ekspor Ikan Tuna Dan Udangtangkap (Studi Pada Sebelum Dan Sesudah Penerapan Permen Kp Nomor 56 Dan 57/Permenkp/2014 Terhadap Volume Ekspor Tuna Dan Udang Tangkap Di Jawa Timur)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 45 No.1 April 2017

<sup>32</sup> Ibid.

oleh kapal Vietnam sebanyak 46 kapal. Selanjutnya kapal yang berbendera Filipina sebanyak 19 kapal, lalu 12 kapal Malaysia, dan 9 kapal Thailand.<sup>33</sup>

Gambar 2.3 Rekapitulasi Data Penangkapan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan tahun 2014-2017



Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, November 2017

Dari gambar 2.3 menjelaskan bahwa adanya peningkatan jumlah awak kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan yang berhasil ditangkap oleh PPNS Perikanan dari tahun 2014 sampai dengan November 2017. Negara asal awak kapal yang terbanyak ditangkap adalah berkewarganegaraan Vietnam berjumlah sekitar 1.891 awak kapal, Indonesia berjumlah 1.067, Filipina sekitar 681, Thailand berjumlah 305, Tiongkok 101 orang, Myanmar 91, Malaysia 41, Kamboja 38, Laos 4 dan yang paling sedikit tertangkap adalah awak kapal bernegara Taiwan hanya ada 1 orang.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Kapal Asing Pelaku "Illegal Fishing" Terbanyak dari Vietnam*, Kompas.com

<sup>34</sup> Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, November 2017